

BAB VI

SARAN

Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di apotek Bagiana, terdapat beberapa hal yang perlu disarankan yakni :

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA di apotek disarankan untuk terlebih dahulu membekali diri dengan pengetahuan tentang manajemen apotek serta perundang-undangan sehingga dapat berperan aktif selama PKPA.
2. Mahasiswa disarankan agar dapat menambah wawasan tentang obat-obatan terutama nama obat, kandungan bahan aktif, serta indikasinya sehingga dapat berperan aktif selama PKPA.
3. Mahasiswa disarankan agar dapat melatih kemampuan berkomunikasi sehingga penyampaian KIE kepada pasien dapat berjalan lancar dan baik.
4. Apotek sebaiknya segera menyelesaikan perpanjangan SIA yang dimulai dari perpanjangan SIPA Apoteker Penanggungjawab Apotek, agar dapat melanjutkan pelayanan kefarmasian secara menyeluruh termasuk melayani resep narkotika dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Hospital Pharmacists (ASHP), 1993, *Pharmaceutical Care*
- Anonim, 1997, *Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta.*
- Anonim, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ MENKES/ SK/X/ 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/ MENKES/ PER/ X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/ MENKES/ SK/IX/ 2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta, 2004.*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, Jakarta.2007.*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/ PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2011.*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016*

- Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta, 2016.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Jakarta, 2017.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang No.35 tentang Narkotika Tahun 2009*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Drug Information Handbook, 17th ed., Lexi-Copm Inc., New York. Lacy, C. F., Armstrong, L., Golgman, M. P., Lance, L. L., 2009.
- Drug Information Handbook, 18th ed., Lexi-Copm Inc., New York. McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- ISFI, 2008, ISO Farmakoterapi, PT ISFI, Jakarta. Lacy, C. F., Armstrong, L., Golgman, M. P., Lance, L. L., 2008,
- MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi Edisi 12*, 2012/2013. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2008, *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, Edisi 2, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.